

ANALISIS HUBUNGAN KERJA STRUKTURAL, FUNGSIONAL DAN SINERGITAS ANTARA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL DENGAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM PENYEBARAN INFORMASI DI KABUPATEN SOPPENG

Structural Relationship, Functional Relationship and the Synergy Between of Public Relations and Protocol Department with Officials Communication and Information Service in the Information Dissemination in Soppeng Regency

Musdalifah* Muhammad Nadjib**

*Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng

**Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Unhas

ABSTRAK

Otonomi daerah menyebabkan adanya perbedaan sistem komunikasi, informasi dan kehumasan pada setiap daerah. Penelitian ini bertujuan mengetahui: (1) Bagaimana format hubungan kerja struktural antara bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam penyebaran informasi di kabupaten Soppeng, (2) Bagaimana format hubungan kerja fungsional antara bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam penyebaran informasi di kabupaten Soppeng, (3) Bentuk sinergitas antara bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan tupoksi yang sama. Penelitian ini menggunakan deskriptif, di mana pemilihan informan dilakukan secara purposive sebanyak 9 informan. Data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan metode kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori sistem, teori jaringan komunikasi dan teori birokrasi organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa format hubungan kerja struktural antara bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dalam proses bersurat dan dibawah oleh Asisten yang sama yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Sedangkan format hubungan kerja fungsional antara keduanya berdasarkan tupoksi yang sama. Bentuk sinergitas antara bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika belum maksimal, di mana masih kurang koordinasi dan kerjasama terhadap tupoksi yang sama.

Kata kunci: Format Hubungan Kerja, Sinergitas Humas dan Protokol, Dinas Perhubungan.

ABSTRACT

This study aims to find out: (1) the form of structural work relationship between the Public Relations and Protocol Department with Officials Communication and Information Service in the information dissemination of Soppeng regency, (2) the form of functional work relationship between Public Relations and Protocol Department with Officials Communication and Information Service in the information dissemination of Soppeng regency, (3) the form of synergy between of Public Relations and Protocol Department with Officials Communication and Information Service of Soppeng regency in conducting the same job description. The research was conducted using the descriptive method with 9 (nine) informants that were selected purposively. The data were obtained through deep interviews, observations, and documentation. The analysis was conducted using the qualitative method. The theories included system theory, communication network theory, and organisation bureaucracy theory. The result reveal that the structural work relationship between Public Relations and Protocol Department, and the Office of Transportation, Communication, and Information can be seen in the form of correspondence. The departments and Office are under the same official, namely the Assistant of Governance and Society Welfare. Furthermore, the functional relationship is based on the same job description. Unfortunately, the synergy has not been maximum due to lack of coordination and cooperation in the same job description.

Keywords: Work Connection Format, synergy of Public Relations and Protocol, Office of Transportation.

Pendahuluan

Di era otonomi daerah saat ini, sistem Pemerintahan Daerah sudah berbeda dibandingkan dengan sistem pemerintahan di era orde baru. Kalau di era orde baru, organisasi pemerintah dan sistem informasinya sentralistik yaitu ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Namun, di era Otonomi Daerah ini pembentukan instansi Pemerintah Daerah termasuk sistem komunikasi, informasi dan kehumasan ditentukan oleh Pemerintah Daerah setempat. Oleh karena itu sistem komunikasi, informasi dan kehumasan pada setiap daerah bisa berbeda sesuai dengan perkembangan yang terjadi atau kebutuhan di daerah masing-masing.

Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang cepat telah mendorong perubahan yang signifikan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, lebih lanjut memunculkan berbagai konsep serta pemikiran baru dalam menata kehidupan bernegara. Salah satu di antara perubahan itu adalah paradigma pemerintahan yang mengatakan kalau urusan komunikasi itu diserahkan kepada publik. Sebagai kekeliruan yang telah menimbulkan berbagai permasalahan dalam pengelolaan komunikasi, informasi dan kehumasan. Sepertinya komunikasi tidak dianggap sebagai bagian dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, keberadaan organisasi yang mengelola komunikasi tidak fokus dan variatif.

Pada awal otonomi daerah, pemerintah di daerah bisa membentuk dinas, badan dan lembaga teknis sesuai dengan kebutuhan daerah setempat. Adanya ketentuan ini membuat berbagai daerah membentuk dinas secara berlebihan untuk menampung sebanyak mungkin pejabat struktural. Ketentuan mengenai pembentukan dinas dan lembaga teknis tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. PP ini ditetapkan sejak 23 Juli 2007. Sejatinya bertujuan untuk menegaskan keseriusan pemerintah untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik sejak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah yang sudah terlanjur membentuk dinas

dan lembaga teknis daerah melebihi ketentuan akan segera menyesuaikan.

Sebagian besar provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia mempunyai kelembagaan beragam mengenai bidang komunikasi, informasi dan kehumasan. Dalam konteks komunikasi dan informasi, nomenklatur pun berbeda. Ada yang menggunakan dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo), dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Perhubungan Kominfo), ataupun dinas Kominfo dan PDE. Sedangkan untuk kelembagaan kehumasan masih relatif beragam, karena menjalankan fungsi staf di Sekretariat Daerah. Perbedaannya dalam hal menggabungkan yaitu bisa bersama hukum, umum ataupun protokol.

Kelembagaan mengenai komunikasi, informasi dan kehumasan pada kabupaten Soppeng yaitu bagian Humas dan Protokol yang berada di Sekretariat Daerah dan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Sebagai bagian di Sekretariat Daerah, kepala bagian Humas dan Protokol berada pada eselon III sedangkan kepala dinas Perhubungan dan Kominfo berada pada Eselon II. Bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sama-sama berada di bawah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Adanya dua lembaga yang menangani komunikasi dan informasi ini merupakan sistem komunikasi dan informasi di kabupaten Soppeng. Kedua lembaga ini bisa secara bersama-sama menjalankan tugasnya dalam diseminasi informasi pada masyarakat.

Sistem komunikasi dan informasi ini mempunyai peran penting untuk mensukseskan pembangunan di suatu daerah. Sistem komunikasi dan informasi yang baik bisa menciptakan kesatuan gerak dan langkah antar lembaga/dinas untuk mencapai tujuan. Jika sistem ini tidak berjalan dengan baik maka dimungkinkan terjadinya tumpang tindih kegiatan, bahkan bisa terjadi kegiatan yang saling bertentangan. Sebaliknya, kalau berjalan dengan baik akan memungkinkan program-program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah bisa direspon oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat.

Hubungan kerja merupakan faktor yang sangat dominan di dalam suatu organisasi. Oleh

karena itu, hubungan kerja harus secara terus menerus ditingkatkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara optimal. Sebagaimana diketahui bahwa dalam suatu organisasi memiliki tujuan. Untuk mencapai tujuan itu, orang-orang atau bagian-bagian yang terkandung di dalam organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan pencapaian tujuan, harus melakukan hubungan kerja dengan sebaik-baiknya.

Pada kegiatan yang lebih luas dalam kompleks hubungan kerja ini semakin menjadi penting, mengingat dalam era globalisasi tidak satupun unit kerja atau organisasi yang dapat mencapai tujuan tanpa melakukan hubungan kerja dengan unit kerja yang lain. Di dalam pemerintahan (Departemen Lembaga Pemerintah Non Departemen) atau instansi pemerintah lainnya sebagai suatu organisasi yang mempunyai tujuan.

Untuk mencapai tujuannya seluruh aparat dan bagian yang ada di dalamnya atau pihak-pihak lain yang terkait perlu mengadakan hubungan kerja. Bahkan lebih dari itu, semua bagian harus bergerak sebagai satu kesatuan yang terkoordinasi. Kegiatan hubungan kerja dalam organisasi merupakan bagian integral dan komprehensif dalam mencapai tujuan dari organisasi yang bersangkutan.

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya masing-masing unit kerja, para pejabat dan orang-orang yang ada di dalam unit kerja itu tidak mungkin lepas melakukan hubungan kerja, baik antar mereka di dalam organisasi atau unit maupun antar mereka dengan pihak luar. Sebaiknya bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mengelola informasi secara sistematis, agar dapat dikembangkan menjadi pengetahuan yang bermanfaat guna peningkatan kualitas kehidupan dan pembangunan, menjadi pusat informasi dan komunikasi bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah sekaligus berperan menjadi pusat pembelajaran dan pengetahuan. Bersinergi dengan seluruh Dinas/Badan/Kantor, ormas, Orpol, LSM dan masyarakat untuk menjawab tantangan masa kini maupun masa depan.

Namun, antara bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang tidak berada di dalam satu

kantor, dalam menyebarkan informasi seharusnya melakukan komunikasi ataupun koordinasi terlebih dahulu. Ini dimaksudkan agar informasi dapat dikemas dengan baik sehingga tidak menyebabkan informasi yang tumpang tindih ataupun informasi yang disampaikan tidak kena sasaran, tidak saling melempar tanggung jawab mengingat dalam Perbup Soppeng No:11/PER-BUP/IX/2008 yang mengatur tentang tupoksi bagian Humas dan Protokol serta Perbup Soppeng No:19/PER-BUP/IX/2008 mengenai tupoksi dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ada kemiripan. Bukan hanya tupoksi yang sama, isi program kerja juga ada yang sama. Tupoksi yang sama, agar tidak terjadi ketumpangtindihan dalam pelaksanaannya sebaiknya mereka saling berkoordinasi dan berkomunikasi serta bersinergi.

Sinergi merupakan saling mengisi dan melengkapi untuk mencapai hasil yang lebih besar. Bersinergi berarti menghargai perbedaan ide, pendapat dan bersedia saling berbagi. Sinergitas sangat diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu membahas mengenai analisis hubungan kerja struktural, fungsional dan sinergitas antara bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam penyebaran informasi di kabupaten Soppeng.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana format hubungan kerja struktural antara bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam penyebaran informasi di kabupaten Soppeng?
2. Bagaimana format hubungan kerja fungsional antara bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam penyebaran informasi di kabupaten Soppeng?

3. Bagaimana bentuk sinergitas antara bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di kabupaten Soppeng dalam melaksanakan tupoksi yang sama?

Kajian Konsep dan Teori

a. Komunikasi

Sebuah definisi singkat dibuat oleh Harold D. Laswell bahwa cara yang tepat untuk menerangkan suatu tindakan komunikasi ialah menjawab pertanyaan “Siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, melalui saluran apa, kepada siapa dan apa pengaruhnya.”(Cangara, 2012:21)

Definisi yang dibuat oleh kelompok sarjana komunikasi, yang mengkhususkan diri pada studi komunikasi antarmanusia (*human communication*) bahwa: “Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan (1) membangun hubungan antar sesama manusia; (2) melalui pertukaran informasi; (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain; serta (4) berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu.”

Dalam ilmu pengetahuan unsur atau elemen adalah konsep yang dipakai untuk membangun suatu ilmu pengetahuan. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi pengetahuan atau perilaku seseorang. Dari pengertian komunikasi yang sederhana ini, maka bisa dikatakan bahwa suatu proses komunikasi tidak akan berlangsung tanpa didukung oleh unsur-unsur: pengirim (*source*), pesan (*message*), saluran/media (*channel*), penerima (*receiver*) dan akibat/pengaruh (*effect*). Unsur-unsur ini bisa juga disebut komponen atau elemen komunikasi (Cangara, 2012:25)

b. Hubungan Kerja

Hubungan kerja merupakan faktor yang sangat dominan di dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, hubungan kerja harus terus menerus ditingkatkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara optimal. Untuk mencapai tujuan itu, bagian yang terkandung di dalam organisasi

harus melakukan hubungan kerja dengan sebaik-baiknya. Orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan itu harus bekerjasama, baik antar mereka di dalam organisasi maupun dengan pihak di luar organisasi akibat penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Bagian-bagian dengan tingkatan-tingkatan yang ada dalam suatu organisasi merupakan suatu struktur. Untuk memperjelas hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam organisasi, struktur ini biasanya digambarkan dalam bentuk bagan yang kemudian lebih dikenal dengan bagan struktur organisasi. Bagan struktur organisasi itulah yang menggambarkan suatu organisasi formal. Dalam organisasi formal yang digambarkan dalam bagan struktur organisasi tampak garis-garis hubungan kerja formal antara bagian-bagian yang ada dalam organisasi yang bersangkutan. Di samping itu, terdapat juga hubungan kerja informal yang tidak berdasarkan pada bagan struktur. Hal ini menunjukkan adanya interaksi antar unit kerja dalam mekanisme kerja organisasi.

Hubungan ini ada karena pejabat yang satu atau unit kerja yang satu harus membantu pejabat atau unit kerja yang lain dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi yang telah dibebankan kepadanya. Jadi hubungan kerja dapat dirumuskan sebagai keterkaitan antar pejabat atau antar unit kerja dalam menyelesaikan pekerjaan masing-masing dalam melaksanakan tugas organisasinya. Contohnya, bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika secara timbal balik.

Hubungan kerja di dalam organisasi menurut arahnya dapat vertikal, horizontal maupun diagonal yang sifatnya internal. Hubungan kerja ini dapat juga keluar yang disebut hubungan kerja eksternal, seperti hubungan kerja antara organisasi.. garis hubungan ini tidak mungkin dihilangkan dari struktur organisasi, demikian juga hubungan kerja di dalam setiap sistem organisasi. Hubungan kerja ini akan lahir bersama-sama dengan terbentuknya organisasi. Tanpa adanya hubungan kerja yang dilaksanakan dengan baik antar berbagai pihak di dalam organisasi, maka

proses administrasi dari organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan efisiensi organisasi yang bersangkutan akan terganggu.

Dalam organisasi pemerintahan ada 2 (dua) bentuk hubungan kerja, yaitu :

1. Hubungan Kerja Struktural

Hubungan Kerja Struktural adalah hubungan kerja antara unit/instansi berdasarkan struktur organisasinya.

2. Hubungan Kerja Fungsional

Hubungan kerja fungsional adalah hubungan kerja antara unit atau pejabat yang mempunyai bidang kerja yang sama. Tingkat atau eselon unit atau pejabat tersebut bisa sama atau tidak sama.

Meskipun tidak merupakan keharusan, tetapi biasanya pejabat yang mengkoordinasikan mempunyai eselon atau tingkat yang lebih tinggi dalam hirarki organisasi. Organisasi sebagai wadah kerja sama relatif bersifat statis, mengandung stabilitas, dengan maksud untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan kerja sama sebagai syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran.

Namun demikian tidak dapat disangkal, jika diharapkan organisasi akan maju dan berkembang, tidak ada satupun organisasi di dunia ini yang mutlak bersifat statis.. Oleh karena itu tepatlah bila organisasi di samping ditinjau sebagai wadah juga ditinjau sebagai proses pengelompokan orang-orang dalam suatu kerja sama yang efisien untuk mencapai tujuan yang sifatnya dinamis.

Akan tetapi memang tidak dapat dihindarkan bahwa dalam setiap organisasi, di samping hubungan kerja formal atau hubungan kerja kedinasan terdapat pula hubungan informal atau hubungan keakraban. Hubungan informal ini timbul dengan sendirinya sejalan dengan hakikat manusia dengan segala sifat sebagai makhluk sosial.

c. Humas dan Protokol

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no.13 tahun 2011, mengenai pedoman pelaksanaan tugas kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah bahwa hubungan masyarakat pemerintah yang selanjutnya disebut Humas Pemerintah adalah aktivitas lembaga dan atau individu

penyelenggara pemerintahan, yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan sebaliknya. Lembaga Kehumasan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Lembaga Kehumasan adalah unit organisasi dalam suatu lembaga pemerintahan yang melakukan fungsi manajemen bidang komunikasi dan informasi serta tugas-tugas kehumasan.

Perbedaan utama antara fungsi dan tugas humas yang terdapat di instansi dinas pemerintah dan lembaga non-pemerintah (perusahaan komersial swasta) yaitu tidak ada sesuatu yang diperjualbelikan atau transaksi terjadi yang ditawarkan kepada pihak yang membutuhkan secara komersial. Melalui unit atau program kerja humas tersebut, pemerintah dapat melaksanakan penyampaian informasi pembangunan, penjelasan mengenai kebijaksanaan atau tindakan-tindakan tertentu serta kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan kewajiban atau tugas pemerintahan.

Menurut John D.Millet dalam Ruslan (2008:107-108) bahwa peran humas/PR dinas instansi atau lembaga pemerintahan terdapat beberapa hal dalam melaksanakan tugas atau kewajiban utamanya, yaitu:

1. Mengamati dan mempelajari keinginan-keinginan, dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat.
2. Kegiatan untuk memberikan nasihat atau sumbang saran dalam menanggapi apa yang sebaiknya dapat dilakukan instansi/lembaga pemerintah seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya.
3. Kemampuan untuk mengusahakan terciptanya hubungan memuaskan antara publik dengan para pejabat pemerintah.
4. Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan.

Pejabat kehumasan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk mencari, mengolah dan menganalisa informasi, kemudian menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan strategis kehumasan untuk meningkatkan citra pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. Menyebarluaskan informasi

kebijakan pemerintahan, politik, pembangunan dan kemasyarakatan serta menanggapi berita dan pendapat publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Humas dalam fungsinya sebagai manajemen melaksanakan kegiatan kehumasan untuk menilai sikap dan opini public, mengidentifikasi kebijaksanaan dan tata cara organisasi serta menyusun perencanaan kebijakan, program dan kegiatan komunikasi untuk memperoleh pengertian dan dukungan publik. Ruang lingkup kehumasan pemerintah kabupaten terkait fungsinya dalam membangun hubungan kerja diimplementasikan dalam peran koordinasi dan konsultatif antar unit atau satuan kerja, media massa dan lembaga masyarakat lainnya.

d. Informasi

Secara definisi, informasi diartikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya (Raymond Mcleod dalam Ladjamuddin, 2005:9). Informasi juga dapat diartikan sebagai data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut (McFadden dkk dalam Mulyanto, 2009:17).

(Ladjamuddin, 2005:11-12) bahwa kualitas informasi sangat ditentukan oleh :

- a. Relevan, yakni seberapa jauh tingkat relevansi informasi tersebut dengan kenyataan masa lalu, kejadian hari ini dan kejadian yang akan datang.
- b. Akurat, yakni suatu informasi dikatakan berkualitas jika seluruh kebutuhan informasi tersebut telah tersampaikan.
- c. Tepat waktu, yakni berbagai proses dapat diselesaikan dengan tepat waktu.
- d. Ekonomis, yakni informasi yang dihasilkan mempunyai nilai jual tinggi serta biaya operasional yang minim untuk menghasilkan informasi tersebut.
- e. Efisien, yakni memiliki sintak dan kalimat yang jelas dan sederhana namun mampu memberikan makna dan hasil yang mendalam.
- f. Dapat dipercaya, yakni informasi tersebut berasal dari orang yang dipercaya.

Dalam komunikasi organisasi, berarti informasi yang berpindah secara formal dari seseorang dalam struktur organisasi. Setidaknya ada empat aliran formal informasi dalam organisasi, yaitu (Face dan Fausel dalam Fitri 2013:33-35) :

- 1) Komunikasi ke bawah. Di mana dalam sebuah organisasi bahwa informasi mengalir dari jabatan berotoritas lebih tinggi kepada mereka yang lebih rendah. Jenis informasi ini berupa; informasi mengenai bagaimana melakukan pekerjaan, mengenai dasar pemikiran melakukan pekerjaan, mengenai kinerja pegawai.
 - 2) Komunikasi ke atas. Informasi yang mengalir dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi.
 - 3) Komunikasi horizontal. Penyampaian informasi di antara rekan-rekan sejawat dalam unit kerja yang sama.
 - 4) Komunikasi lintas saluran. Dalam kebanyakan organisasi muncul keinginan pegawai untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional dengan individu yang tidak menduduki posisi atasan atau bawahan mereka.
- Sementara arus komunikasi organisasi di atas dapat dilaksanakan dengan 3 cara yaitu : a). Penyebaran pesan secara serentak, yaitu apabila semua anggota organisasi menerima suatu informasi dalam waktu yang bersamaan; b). Penyebaran pesan secara berurutan, yaitu apabila anggota organisasi menerima suatu informasi berdasarkan urutan yang telah ditetapkan sebelumnya; c). Penyebaran pesan secara kombinasi, yaitu apabila anggota organisasi menerima suatu informasi dalam waktu bersamaan.

e. Sinergitas

Sinergi adalah bentuk kerjasama yang dihasilkan melalui kolaborasi masing-masing pihak tanpa adanya perasaan kalah. Sinergi adalah saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih besar daripada jumlah bagian per bagian. Konsep bersinergi di antaranya :

- a. Berorientasi pada hasil dan positif
- b. Perspektif beragam mengganti atau melengkapi paradigma

- c. Saling bekerjasama dan bertujuan sama serta adanya kesepakatan
- d. Sangat efektif diusahakan dan merupakan suatu proses

Melalui sinergi, kerjasama dari paradigma yang berbeda akan mewujudkan hasil lebih besar dan efektif sehubungan proses yang dijalani menunjukkan tujuan yang sama dan kesepakatan demi hasil positif. Bersinergi berarti saling menghargai perbedaan ide, pendapat dan bersedia saling berbagi. Bersinergi tidak bertujuan memadukan bagian-bagian terpisah. Sinergi adalah proses yang harus dilalui masing-masing pihak, yang mana perlu waktu dan konsistensi. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk membangun rasa saling percaya sehingga sinergi terbangun sebagai kerjasama kreatif di antaranya:

- 1. Berbuatlah kepada orang lain sebagaimana anda ingin diperlakukan orang lain

- 2. Jangan menilai buruk terhadap pihak lain
- 3. Jangan memberikan janji yang anda tak yakin memenuhinya
- 4. Jangan mengecewakan harapan orang lain

Mewujudkan sinergi adalah keberhasilan bersama yang terbina dari kebiasaan. Mewujudkan sinergi bukan berarti berkompromi di tengah, melainkan mencari alternatif ketiga dan mencapai puncak. Sinergi akan membangun kerjasama-kerjasama kreatif dengan cara menghormati perbedaan, membangun kekuatan dan mengkompensasikan kelemahan. Sinergi dapat menekan cost atau biaya operasional tanpa mengurangi pendapatan operasional.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di kabupaten Soppeng.

Informan penelitian dalam tabel berikut ini:

No	Informan	Jabatan	Jumlah
1	Drs.H.A.Akbar Nur Thahir	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1
2	Ilham, S.Sos	Kabag Humas dan Protokol	1
3	A.Aswan A.Said	Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1
4	Sari Diana Muallim, S.Sos,MM	Kasubag Peliputan, Pemberitaan, Protokol dan Perjalanan	1
5	A.Amsal Hayri, SE	Kasubag Santel dan PDE	1
6	Haeruddin	Staf Bagian Humas dan Protokol	1
7	H. Mursalim, SE	Kabid Informasi dan Telematika	1
8	Mamma, SE	Kabid Pelayanan Informasi	1
9	Sayuti, ST	Staf Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2015

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif (Descriptive Qualitative Studies), yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta dan fenomena hubungan kerja antara bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam penyebaran informasi di Kabupaten Soppeng dengan lebih dahulu mengumpulkan informasi aktual yang menggambarkan gejala yang ada, kemudian mengidentifikasi masalah dan memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku.

Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis instrumen pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

Terkait dengan tujuan penelitian ini, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang dikumpul akan dianalisa berdasarkan kata-kata yang disusun ke dalam bentuk teks yang diperluas (Miles dan Huberman, 1992). Data yang terkumpul dari hasil pengamatan dan

wawancara di lapangan akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk kata-kata dan narasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Hubungan Kerja Struktural antara Bagian Humas dan Protokol dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam Penyebaran Informasi di Kabupaten Soppeng

Hubungan Kerja merupakan hubungan yang terjadi antara bagian-bagian atau individu-individu baik antara mereka di dalam organisasi maupun antara mereka dengan pihak luar sebagai akibat penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Hubungan Kerja Struktural adalah hubungan kerja antara unit/instansi berdasarkan struktur organisasinya. Di Kabupaten Soppeng ada 2 (dua) lembaga yang menangani informasi yaitu Bagian Humas dan Protokol yang berada pada Sekretariat Daerah dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Dalam struktur organisasi Kabupaten Soppeng, Bagian Humas dan Protokol secara keseluruhan membawahi 3 (tiga) sub bagian. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Humas dan Protokol Bapak Ilham, S.Sos, bahwa:

“Di Humas itu ada tiga sub bagian dan masing-masing memiliki tugas yang berbeda. Pertama sub bagian peliputan, pemberitaan, protokol dan perjalanan yang bertugas mengumpulkan bahan dan mengolah data dalam rangka perumusan kebijakan dan melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas peliputan, pemberitaan, protokol dan perjalanan. Kedua, sub bagian penghubung pemda yang mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan mengolah data dalam rangka perumusan kebijakan dan melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas penghubung pemda. Terakhir, sub bagian santel dan PDE yang bertugas mengumpulkan bahan dan mengolah data dalam rangka perumusan kebijakan dan melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas sandi, telekomunikasi dan pengolahan data

elektronik.”(Hasil wawancara tanggal 16 April 2015)

Sedangkan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika membawahi 4 (empat) bidang. Menurut Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (bapak A. Aswan. A. Said) bahwa :

“Di Perhubungan dan Kominfo itu membawahi 4 (empat) bidang. Ada 2 (dua) bidang yang berhubungan dengan perhubungannya yaitu bidang lalu lintas dan angkutan dengan bidang teknis sarana dan prasarana. Ada juga 2 (dua) bidang yang berhubungan dengan kominfo yaitu bidang informasi dan telematika dengan bidang pelayanan informasi. Masing-masing bidang membawahi 3 (tiga) seksi.” (Hasil wawancara tanggal 4 Mei 2015)

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika membawahi 4 (empat) bidang, yaitu: (1) Bidang lalu lintas dan angkutan yang membawahi 3 seksi yaitu (a) seksi manajemen rekayasa lintas, perizinan dan pengujian, (b) seksi keselamatan dan ketertiban, (c) seksi pembinaan angkutan darat, sungai dan danau. (2) Bidang teknis sarana dan prasarana, yang juga membawahi 3 seksi yaitu (a) seksi pembinaan dan operasional, (b) seksi peralatan dan pemeliharaan, (c) seksi terminal dan parkir. (3) Bidang informasi dan telematika, membawahi 3 seksi yaitu (a) seksi media cetak dan teknologi informasi, (b) seksi pembinaan radio, film dan televisi, (c) seksi pos dan telekomunikasi. (4) Bidang pelayanan informasi, juga ada 3 seksi yaitu (a) seksi promosi, pameran dan penerbitan, (b) seksi pemberdayaan kelompok komunikasi dan informasi masyarakat, (c) seksi pelayanan mobile.

Bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu unsur sistem informasi di Pemerintah Kabupaten Soppeng. Kedua lembaga ini bisa secara bersama-sama menjalankan tugasnya dalam diseminasi informasi pada masyarakat.

Sistem informasi pemerintah ini mempunyai peran yang sangat penting untuk mensukseskan pembangunan di suatu daerah. Sistem informasi yang baik, bisa menciptakan

kesatuan gerak dan langkah antar lembaga/dinas untuk mencapai tujuan. Jika sistem informasi tidak berjalan dengan baik, maka dimungkinkan terjadinya tumpang tindih kegiatan, bahkan bisa terjadi kegiatan yang saling bertentangan.

Adanya kesamaan tupoksi antara bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, menurut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Bapak Drs. H. A. Akbar Nur Thahir) :

“Kesamaan tupoksi antara bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan dan Kominfo itu hanyalah nomenklaturnya yang sama, tapi pada pelaksanaannya berbeda. Kalau di Humas itu SDMnya dan di Kominfo itu ITnya.” (Hasil wawancara tanggal 15 April 2015)

Hal senada juga dikatakan oleh Kabag Humas dan Protokol (Bapak Ilham, S. Sos), bahwa:

“Ketumpangtindihan tupoksi antara bagian Humas dengan dinas Kominfo itu hanyalah kesamaan dalam teksnya. Namun dalam pelaksanaannya berbeda. Kita biasanya ada kerjasama kalau ada kegiatan yang sama.”(Hasil wawancara tanggal 16 April 2015)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Bapak A. Aswan. A. Said) :

“Tupoksi yang sama antara bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan dan Kominfo itu tidak menyebabkan tumpang tindih tupoksi ataupun kegiatan. Karena dengan tupoksi yang sama, bisa saling kerjasama.”(Hasil wawancara tanggal 4 Mei 2015)

Dari hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa kesamaan tupoksi tidak menyebabkan ketumpangtindihan tupoksi. Hal ini disebabkan karena antara bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melakukan kerjasama atau hubungan kerja terutama dengan tupoksi yang sama. Menurut Kasubag Peliputan, Berita, Protokol dan Perjalanan bahwa:

“Antara bagian Humas dengan Kominfo itu biasa ada hubungan kerja di antara kami.

Misalnya, Kominfo meminta bapak Bupati untuk memberikan sambutan, maka Kominfo bersurat ke Sekretariat Daerah melalui bagian Umum lalu naik di Asisten 1 (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) sebelum masuk ke pak Sekda untuk dilanjutkan ke Bupati. Pada akhirnya nanti di ACC ke bagian Humas untuk dibuatkan sambutannya.”(Hasil wawancara dengan Ibu Sari Diana Muallim, SE, MM tanggal 21 April 2015)

Dari hasil wawancara dengan Kasubag Peliputan, Berita, Protokol dan Perjalanan bahwa Hubungan Kerja Struktural antara bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika itu biasanya dalam hal surat menyurat yang harus melalui prosedur. Misalnya, permintaan untuk memberikan materi pada kegiatan yang dilakukan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Hal senada diungkapkan oleh Kabid Pelayanan Informasi bahwa:

“Kami (kominfo) biasa bersurat ke bagian Humas dan Protokol melalui Sekretariat Daerah untuk meminta permohonan memberikan sambutan atau memberikan materi pada kegiatan yang dilakukan Kominfo. Misalnya, kominfo ada kegiatan mengenai pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi. Kegiatan ini bertujuan untuk terwujudnya tenaga kehumasan yang profesional. Di sini kami mengundang kabag Humas sebagai pemateri.” (Hasil wawancara dengan Bapak Mamma, SE tanggal 7 Mei 2015)

Hal yang sama diungkapkan oleh Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :

“Kami ada hubungan kerja dengan Humas. Misalnya. Kominfo ada kegiatan kehumasan. Di kegiatan ini, kami mengundang kabag Humas sebagai pemateri.” (Hasil wawancara dengan Bapak A. Aswan. A. Said tanggal 4 Mei 2015)

Hal senada juga diungkapkan oleh Kabag Humas dan Protokol bahwa :

“Kami di Humas ada hubungan Kerja dengan dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika. Salah satunya adalah wartawan dan media massa. Biasanya kami memfasilitasi mereka (Kominfo) bertemu dengan wartawan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Ilham, S.Sos tanggal 16 April 2015)

Hubungan kerja struktural antara bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bisa terlihat dalam hal permintaan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kepada bagian Humas dan Protokol untuk memberikan materi pada kegiatan yang dilakukan. Hubungan kerja struktural ini dibatasi oleh birokrasi.

2. Hubungan Kerja Fungsional antara Bagian Humas dan Protokol dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam Penyebaran Informasi di Kabupaten Soppeng

Hubungan kerja fungsional merupakan hubungan kerja antara unit atau pejabat yang mempunyai bidang kerja yang sama. Tingkat eselon unit atau pejabat bisa sama atau tidak sama. Meskipun tidak merupakan keharusan, tetapi biasanya pejabat yang mengkoordinasikan mempunyai eselon yang lebih tinggi dalam hierarki organisasi.

Hubungan kerja fungsional yang berbeda tingkat eselon antara bagian Humas dan Protokol (kabag eselon III) dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (kadis eselon II dan kabid III). Hubungan kerja ini untuk memelihara dan mengembangkan semangat persatuan pada setiap orang karena tugas dirinya dengan tugas pihak lain di dalam organisasi merupakan bagian-bagian dari tugas yang lebih besar sehingga setiap tugas berkaitan erat dan pelaksanaannya perlu saling

mendukung terutama dengan tupoksi yang sama.

Adanya tingkat eselon yang berbeda di antara keduanya tidak berarti bahwa tingkat eselon yang lebih rendah yang selalu menerima perintah. Sesuai dengan pernyataan kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (bapak A. Aswan. A. Said) :

“Dinas Kominfo di saat ada kegiatan yang juga melibatkan bagian Humas, kami tetap bersurat ke Sekretariat Daerah yang ditujukan kepada bagian Humas. Misalnya permintaan untuk membawakan materi pada kegiatan yang kami adakan.” (Hasil wawancara tanggal 4 Mei 2015)

Dari hasil wawancara dengan kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bahwa tingkat eselon yang lebih tinggi tidak mesti yang harus memerintah. Ketika membutuhkan bantuan kepada kantor atau instansi yang tingkat eselonnya lebih rendah, maka tetap harus bersurat atau bermohon kepada kantor tersebut.

Hal senada juga disampaikan kabag Humas dan Protokol (Bapak Ilham, S.Sos) :

“Tupoksi yang sama antara bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menimbulkan isu adanya ketumpangtindihan tupoksi, apalagi dengan kegiatan yang sama bisa menimbulkan saling melempar tanggung jawab. Padahal dengan tupoksi yang sama bisa saling kerjasama” (Hasil wawancara tanggal 16 April 2015)

Tupoksi yang sama antara bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kabupaten Soppeng adalah :

Tupoksi yang Sama antara Bagian Humas dan Protokol dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdapat dalam tabel berikut:

Bagian Humas dan Protokol dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
<ol style="list-style-type: none"> 1. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

- b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
- 2. Program kerjasama informasi dengan media massa
 - a. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2015

Menurut kasubag Santel dan PDE bahwa: *“Di bagian Humas ada program pengembangan komunikasi dan informasi. Di sini, kami ada beberapa kegiatan. Salah satunya adalah pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi informasi yang bertujuan untuk terciptanya pemerataan informasi melalui ter-update-nya berita di website resmi kabupaten Soppeng.”* (Hasil wawancara dengan Bapak A. Amsal Hayri, SE tanggal 24 April 2015)

Hal senada di tempat yang berbeda juga diungkapkan oleh kapid Informasi dan Telematika yaitu:

“Di Kominfo itu ada kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi informasi. Kegiatan ini bertujuan agar terciptanya pemerataan informasi. Misalnya, Kominfo mengikuti event pameran. Di sini kita menyebarkan informasi pembangunan kabupaten Soppeng kepada masyarakat.” (Hasil wawancara dengan Bapak H. Mursalim, SE tanggal 5 Mei 2015)

Kegiatan yang sama antara bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yaitu dalam pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi informasi, masing-masing mempunyai tujuan yang sama yaitu terciptanya pemerataan informasi, namun dalam pelaksanaan yang berbeda. Pada bagian Humas dan Protokol dalam kegiatan ini menyebarkan informasi melalui website sedangkan pada dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan mengikuti event pameran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kasubag Santel dan PDE (bapak A. Amsal Hayri, SE) bahwa:

“Kami di Humas, untuk ter-update-nya berita di website resmi kabupaten

Soppeng, kami mengambil berita dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan pimpinan maupun setiap SKPD. Kalau saya pribadi, seharusnya setiap SKPD memiliki Humas dan Humas itu nantinya yang mengirim email ke Humas Sekretariat Daerah mengenai informasi atau kegiatan di kantornya agar informasi yang keluar disatukan melalui website resmi kabupaten Soppeng, sesuai dengan fungsi Humas sebagai “juru bicara” Pemda. Namun hal ini belum terlaksana.” (Hasil wawancara tanggal 24 April 2015)

Menurut kasubag Santel dan PDE bahwa untuk ter-update-nya berita di website resmi kabupaten Soppeng, bagian Humas dan Protokol mengambil berita dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan pimpinan dan setiap SKPD. Sebaiknya setiap SKPD memiliki Humas yang nantinya akan memberikan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan kantornya kepada bagian Humas dan Protokol, agar informasi yang disebarluaskan melalui satu pintu. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang dikeluarkan kena sasaran dan masyarakat mengerti isi pesannya.

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (bapak A. Aswan. A. Said) yaitu:

“Dalam penyebaran informasi, seharusnya website resmi kabupaten Soppeng itu dikelola oleh Kominfo. Tapi dulu di Kominfo tidak memiliki SDM yang bisa mengelolanya, makanya diambil alih oleh bagian Humas. Menurut saya, bagian Humas Sekretariat Daerah maupun tiap SKPD bisa saja memiliki website sendiri-sendiri, namun untuk pemerataan informasi setiap SKPD harus mengirim informasi kantornya di Kominfo. Sekarang ini kami (Kominfo) sedang membuat website untuk penyebaran informasi pembangunan kepada seluruh masyarakat,

khususnya masyarakat kabupaten Soppeng. Tapi belum dioperasikan.” (Hasil wawancara tanggal 4 Mei 2015)

Dari hasil wawancara di atas antara kasubag Santel dan PDE yang berada di bawah bagian Humas dan Protokol dengan kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika maka penulis melihat masing-masing instansi menganggap bahwa informasi mengenai kabupaten Soppeng seharusnya melalui kantornya. Tapi pada dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika karena tidak memiliki SDM yang bisa mengelola website resmi kabupaten Soppeng maka diambil alih oleh bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah. Padahal dengan tupoksi yang sama, dapat melakukan hubungan kerja ataupun koordinasi agar kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dan sebaliknya bisa saling mendukung.

Tupoksi lain yang sama antara bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi. Pada bagian Humas dan Protokol bertujuan agar data informasi kepada masyarakat lebih akurat, sedangkan pada dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memiliki tujuan terwujudnya kesamaan persepsi antara pemerintah, pers dan masyarakat. Menurut wawancara dengan kabid Informasi dan Telematika bapak H. Mursalim, SE, bahwa :

“Kominfo juga mempunyai kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan persamaan persepsi antara pemerintah, pers dan masyarakat. Di sini kami biasanya mengikuti forum kehumasan dan jumpa pers. Misalnya, mengadakan pertemuan dengan wartawan terkait informasi yang mereka butuhkan. Hubungan dengan wartawan harus dijaga dengan baik.” (Hasil wawancara tanggal 5 Mei 2015)

Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi, pada dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika mengikuti forum kehumasan dan jumpa pers. Misalnya, mengadakan pertemuan dengan wartawan terkait informasi yang wartawan butuhkan, karena hubungan baik dengan wartawan harus tetap dijaga.

Sedangkan menurut penuturan kasubag Santel dan PDE (bapak A. Amsal Hayri, SE) bahwa :

“Kami di Humas ada kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi. Kegiatan dimaksudkan agar data informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu lebih akurat. Kami biasanya kerjasama dengan pers. Misalnya, dalam sebulan itu kalau tidak salah 5-7 berita. Kami juga biasanya memfasilitasi Kominfo kalau mereka mau mengadakan pertemuan dengan pers.” (Hasil wawancara tanggal 24 April 2015)

Hal senada juga diungkapkan oleh kabag Humas dan Protokol bapak Ilham, S. Sos :

“Kami di Humas ada hubungan kerja dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Salah satunya adalah wartawan dan media massa. Biasanya kami memfasilitasi mereka bertemu dengan wartawan.” (Hasil wawancara tanggal 16 April 2015)

Bagian Humas dan Protokol pada kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi melakukan kerjasama dengan pers. Dalam sebulan 5 sampai 7 berita mengenai kabupaten Soppeng yang dimuat. Bagian Humas dan Protokol melakukan hubungan kerja dengan memfasilitasi dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam pertemuan dengan wartawan.

Tupoksi lain yang sama adalah program kerjasama informasi dengan media massa di mana juga ada kegiatan yang sama yaitu penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan ini pada bagian Humas dan Protokol memiliki tujuan terlaksananya peliputan dan dokumentasi kegiatan. Sedangkan pada dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bertujuan terwujudnya dokumentasi kegiatan pemerintah. Menurut kasubag Peliputan, Berita, Protokol

dan Perjalanan, Ibu Sari Diana Muallim, SE, MM bahwa :

“Kegiatan Humas mengenai penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, bertujuan agar terlaksananya peliputan dan dokumentasi semua kegiatan pemerintahan. Kami di Humas lebih fokus sama kegiatan pimpinan pada lingkup Sekretariat Daerah. Misalnya, kegiatan bapak Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten.” (Hasil wawancara tanggal 21 April 2015)

Bagian Humas dan Protokol pada kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melakukan peliputan dan dokumentasi semua kegiatan pemerintahan, khususnya kegiatan pimpinan pada lingkup Sekretariat Daerah karena lebih dekat dengan pimpinan.

Menurut kabid Pelayanan Informasi, bapak Mamma, SE :

“Kami di dinas Perhubungan Kominfo ada kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan ini bertujuan agar terwujudnya dokumentasi kegiatan pemerintah. Di sini, kami mengadakan peliputan dan dokumentasi terhadap kegiatan pemerintahan daerah. Misalnya, membuat klipping.” (Hasil wawancara tanggal 7 Mei 2015)

Hal senada juga diungkapkan oleh staf bagian Humas dan Protokol, bahwa :

“Dalam kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, kami mengadakan peliputan dan dokumentasi. Biasanya kalau ada kegiatan pemerintah atau pimpinan, kami liput kegiatannya dan mendokumentasikannya. Kami juga membuat klipping surat kabar mengenai berita kabupaten Soppeng yang dimuat di surat kabar.” (Hasil wawancara dengan Bapak Haeruddin tanggal 27 April 2015)

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Sayuti, ST selaku staf pada dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :

“Kominfo dalam kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah mengadakan peliputan dan dokumentasi kegiatan pemerintah untuk disebarkan kepada masyarakat. Di sini kami datang meliput kegiatan tersebut dan membuat klipping.” (Hasil wawancara tanggal 11 Mei 2015)

Dari hasil wawancara beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ada pada bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai kesamaan dalam pelaksanaannya yaitu masing-masing mengadakan peliputan berita dan dokumentasi kegiatan serta membuat klipping. Namun peneliti melihat, bagian Humas dan Protokol lebih fokus pada kegiatan pimpinan ruang lingkup Sekretariat Daerah saja karena lebih dekat dengan pimpinan, sedangkan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada kegiatan kabupaten Soppeng secara keseluruhan.

Adanya 2 (dua) instansi berbeda yang menangani informasi diharapkan adanya sinergitas di antara keduanya. Agar sinergitas dapat terwujud di antara dua instansi, diharapkan terbangun pola kerjasama atau hubungan kerja dan koordinasi yang ideal. Ini dimaksudkan agar informasi yang disampaikan ada kesamaan persepsi antara pemerintah, pers dan masyarakat sehingga masyarakat mengerti pesan yang disampaikan oleh pemerintah.

Pembahasan

1. *Format Hubungan Kerja Struktural antara Bagian Humas dan Protokol dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam Penyebaran Informasi di Kabupaten Soppeng*

Hubungan kerja merupakan faktor yang sangat dominan di dalam suatu organisasi. Oleh karena itu, hubungan kerja harus secara terus menerus ditingkatkan dalam rangka mencapai

tujuan organisasi secara optimal. Untuk mencapai tujuan itu, orang-orang atau bagian-bagian yang terdapat di dalam organisasi harus melakukan hubungan kerja dengan baik karena tidak ada satupun unit kerja yang dapat mencapai tujuan tanpa melakukan hubungan kerja dengan unit kerja lain. Bahkan lebih dari itu, semua bagian harus bergerak sebagai satu kesatuan yang terkoordinasi.

Berdasarkan hasil temuan (wawancara) terkait dengan format hubungan kerja struktural antara bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam penyebaran informasi di kabupaten Soppeng, menunjukkan bahwa hubungan kerja struktural antara keduanya sudah berjalan efektif, artinya sesuai dengan prosedur yaitu walaupun dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memiliki tingkat eselon yang lebih tinggi dibanding dengan bagian Humas dan Protokol, tetap bersurat ke Sekretariat Daerah kalau pihak dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika membutuhkan bagian Humas dan Protokol untuk permintaan membawakan materi pada kegiatan yang dilaksanakan. Demikian sebaliknya.

Hubungan kerja dapat diartikan sebagai hubungan yang terjadi antara bagian-bagian atau individu-individu baik antara mereka di dalam organisasi maupun antara mereka dengan pihak luar sebagai akibat penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Bagian-bagian dengan tingkatan-tingkatan yang ada dalam suatu organisasi merupakan suatu struktur. Untuk memperjelas hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam organisasi, struktur ini biasanya digambarkan dalam bentuk bagan yang kemudian lebih dikenal dengan struktur organisasi.

Bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di bawah oleh asisten yang sama yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (asisten I). Namun, dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika memiliki tingkat eselon yang lebih tinggi (eselon IIb) dibanding bagian Humas dan Protokol (eselon IIIb). Perbedaan tingkat eselon di antara keduanya

tidak membuat tingkat eselon yang lebih rendah harus selalu diatur atau menerima perintah.

Dalam komunikasi organisasi, berarti informasi yang berpindah secara formal dari seseorang di dalam struktur organisasi. Komunikasi terdiri dari beberapa komponen dan masing-masing komponen mempunyai tugas masing-masing. Tugas dari masing-masing komponen tersebut saling berhubungan satu sama lain untuk menghasilkan suatu komunikasi.

2. Format Hubungan Kerja Fungsional antara Bagian Humas dan Protokol dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam Penyebaran Informasi di Kabupaten Soppeng

Hubungan kerja fungsional merupakan hubungan kerja antara instansi atau pejabat yang mempunyai bidang kerja yang sama, di mana tingkat eselon instansi atau pejabat tersebut bisa sama bisa tidak. Meskipun tidak merupakan keharusan, tetapi biasanya pejabat yang mengkoordinasikan mempunyai eselon atau tingkat yang lebih tinggi dalam hirarki organisasi.

Dari hasil penelitian terkait dengan format hubungan kerja fungsional antara bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, menunjukkan bahwa hubungan kerja fungsional antara kedua instansi yang berbeda tersebut belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan masih adanya program kerja dengan kegiatan yang sama, masing-masing berjalan sendiri-sendiri dan kurang koordinasi di antara keduanya. Walaupun ada di antara program yang sama dengan kegiatan yang sama, mereka melakukan hubungan kerja.

Hubungan kerja timbul dan sangat dibutuhkan sebagai konsekuensi adanya upaya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui pembagian tugas. Hubungan kerja bertujuan untuk terwujudnya keterpaduan, keserasian dan keselarasan kegiatan-kegiatan seluruh unit yang berkaitan dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Sebagai suatu cara agar dapat terwujudnya hubungan kerja antara kegiatan dari satuan kerja yang satu dengan yang

lainnya, sehingga terdapat suatu kesatuan gerak dan langkah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hal ini sejalan dengan teori sistem Ludwig Van Bertalanff tahun 1940-1950an yang diadopsi dari biologi yang mengatakan bahwa pentingnya saling keterhubungan antara semua elemen tubuh. Untuk bidang komunikasi menurut Greenwood (2010) dalam Kriyantono (2014), teori sistem diadaptasi pada 1970-an untuk menentukan efektivitas komunikasi organisasi. Teori sistem memfokuskan perhatian untuk memahami bagaimana kualitas fungsi yang dijalankan setiap sistem dalam suatu relasi dinamis dengan sistem-sistem lainnya. Jika teori sistem ini diterapkan dalam prinsip pokok yang berlaku yaitu organisasi merupakan salah satu bagian (subsistem) dari suatu sistem sosial yang lebih kompleks, karena saling berhubungan, tergantung dan memengaruhi satu sama lainnya.

Littlejohn (1992) dalam Kriyantono (2014) mengatakan bahwa teori sistem tidak dapat disebut sebagai teori yang khusus membahas komunikasi, tetapi mempunyai aplikasi penting bagi studi komunikasi dan peristiwa sosial lainnya. Teori sistem ini membahas hubungan antar bagian dalam organisasi. Hal ini juga sejalan dengan teori jaringan, di mana salah satu fungsi jaringan dalam organisasi adalah menyatukan orang-orang dengan kelompok yang sama.

3. Bentuk Sinergitas Informasi antara Bagian Humas dan Protokol dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam Melaksanakan Tupoksi yang Sama

Sinergitas merupakan proses memadukan beberapa aktivitas dalam rangka mencapai satu hasil yang berlipat. Mensinergitaskan kelembagaan komunikasi, informasi dan kehumasan dalam hal ini bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika agar program pengelolaan komunikasi dan informasi jadi maksimal. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembuatan PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. PP yang ditetapkan sejak 23 Juli 2007 sejatinya bertujuan menegaskan keseriusan pemerintah untuk menciptakan penyelenggaraan

pemerintahan yang lebih baik sejak pemberlakuan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam usahanya untuk menciptakan atau menata organisasi secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerahnya. Harapannya melalui PP No.41 Tahun 2007 ini akan tercipta tatanan organisasi yang koordinatif, sinergis, terintegrasi serta komunikatif antara kelembagaan pemerintah pusat dan daerah.

Hubungan sinergitas yang saling melengkapi menuju tujuan yang sama agar memiliki pemahaman yang baik dan tepat terkait tugas dan tanggung jawab masing-masing. Untuk itu dibutuhkan suatu hubungan kerja antar instansi sebagai konsekuensi adanya upaya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui pembagian tugas. Sebagai suatu cara agar dapat terwujudnya hubungan kerja antara kegiatan dari suatu satuan kerja yang satu dengan yang lainnya, sehingga terdapat suatu kesatuan gerak dan langkah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait bentuk sinergitas informasi antara bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan tupoksi yang sama, ditemukan bahwa sinergitas antara keduanya belum maksimal atau masih kurang. Ini bisa dilihat dari adanya kegiatan yang sama namun tidak ada koordinasi ataupun kerjasama. Walaupun di kegiatan yang lain yang sama ada koordinasi atau kerjasama.

Bentuk sinergitas antara bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tupoksi yang sama, adalah :

- a. Permintaan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kepada bagian Humas dan Protokol untuk memberikan materi.
- b. Peliputan dan dokumentasi kegiatan pemerintahan daerah. Bagian Humas dan Protokol lebih fokus pada kegiatan pimpinan di lingkup Sekretariat Daerah. Hal ini terjadi karena bagian Humas dan

Protokol lebih dekat dengan pimpinan dan berada pada Sekretariat Daerah. Sedangkan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada informasi mengenai pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

- c. Jumpa pers. Bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menjalin hubungan baik dengan media dan wartawan. Pada kegiatan ini, antara bagian Humas dan Protokol dengan dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ada koordinasi dan kerjasama (bagian Humas dan Protokol memfasilitasi dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika bertemu dengan wartawan).

Kurangnya koordinasi bisa disebabkan karena adanya komunikasi yang tidak efektif di antara keduanya. Betapa pentingnya komunikasi dalam hubungan koordinasi bahwa efisiensi suatu kelompok sangat tergantung pada usaha bagaimana anggota kelompok tersebut dapat dikoordinasikan. Tetapi koordinasi tidak dapat begitu saja terjadi, kecuali melalui komunikasi yang memuaskan di antara para anggota (pegawai-pegawai yang telah mencapai saling pengertian dan bekerjasama).”

Hal ini sejalan dengan teori sistem yang memandang bahwa komunikasi yang dilakukan terjadi dalam sistem saling terhubung dan saling memengaruhi. Komunikasi itu penting bagi lancarnya operasional seluruh sistem organisasi, karena komunikasi mengintegrasikan semua elemen dalam bentuk koordinasi dan terjalin kerjasama sehingga bisa menjaga stabilitas sistem. Hal ini juga sejalan dengan teori jaringan, di mana salah satu fungsi jaringan organisasi adalah mengontrol aliran informasi, menyatukan orang-orang dengan kelompok yang sama dan membangun interpretasi yang sama.

Kesimpulan

1. Format hubungan kerja struktural sudah berjalan efektif. Hal ini sejalan dengan teori sistem dan teori jaringan, di mana salah satu fungsi jaringan organisasi adalah menyatukan orang-orang dengan kelompok yang sama

2. Format hubungan kerja fungsional belum maksimal. Hal ini disebabkan masih adanya program kerja dengan kegiatan yang sama masing-masing berjalan sendiri dan kurangnya koordinasi di antara keduanya. Walaupun ada di kegiatan yang sama mereka melakukan hubungan kerja dan koordinasi (koordinasi untuk menyatukan unit kerja yang mempunyai tujuan yang sama)
3. Bentuk sinergitas dalam melaksanakan tupoksi yang sama adalah:
 - a. Permintaan dinas perhubungan, komunikasi dan informatika kepada bagian humas dan protokol untuk memberikan materi
 - b. Peliputan dan dokumentasi kegiatan pemerintahan daerah
 - c. Jumpa pers

Daftar Pustaka

- Cangara, Hafied. 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Kedua*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Fitri. 2013. *Pendayagunaan Sistem Jaringan Informasi dan Komunikasi oleh Asosiasi Pemkot Seluruh Indonesia (APEKSI) dalam Mendukung Peningkatan Tata Pemerintahan Kota di Kawasan Timur Indonesia*. Universitas Hasanuddin: Makassar
- Kriyantono, Rachmat. 2014. *Teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Ladjamuddin, Al Bahra Bin. 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Graha Ilmu: Tangerang
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. UI Press: Jakarta
- Mulyanto. 2009. *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Ruslan, Rosadi. 2008. *Etika Kehumasan Konsepsi & Aplikasi*. Rajawali Pers: Jakarta.